

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN PANGAN DI KOTA PADANG

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH
MONICA SELES
1310012111238

Program Kekhususan

Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2019

REG NOMOR 17/SKRIPSI /HTN/ FH/02/VIII-2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan.....	13
1. PengertianBadanPengawasObatdanMakanan.....	13
2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	14
3. Tugas dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan	15
4. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	17

B. Tinjauan TentangPenegakanPangan 18

1. PengertianPengawasan	18
2. PengertianPengawasanPangan	20

C. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Pengertian Izin	21
2. Pengertian Perizinan	32
3. SifatIzin	33

4. Tujuan Perizinan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan dari Badan Pengawas Dalam Penegakan Sanksi Pelaku Usaha Keamanan Pangan.....	42
B. Konsekuensi Hukum Untuk Pelaku Usaha Yang Melanggar Aturan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomr 80 Tahun 2017	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN